**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH,**

**DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS,**

**DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP BELANJA DAERAH**

 **DI PROVINSI RIAU**

**Aulia Putri Cornella1), Erni Febrina Harahap2), Kasman Karimi3)**

**Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta**

Email : auliaputricornella@gmail.com, ernifebrinaharahap@bunghatta.ac.id, kasmankarimi@bunghatta.ac.id

**PENDAHULUAN**

Desentralisasi fiskal merupakan pelimpahan wewenang kepada daerah dalam mengelola sumber-sumber keuangan sendiri, sehingga daerah mempunyai kesempatan yang lebih dalam mengatur rumah tangganya. Keputusan menerapkan desentralisasi fiskal menuntut adanya peningkatan ekonomi di daerah karena prinsip dasar pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia adalah *money follows functions*, yaitu fungsi pokok pelayanan publik di daerahkan, dengan dukungan pembiayaan pusat melalui penyerahan sumber-sumber penerimaan kepada daerah (Siagian, 2010). Salah satu sumber penerimaan yang berasal dari daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin besar Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan suatu daerah maka semakin besar juga suatu daerah mampu untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah terutama belanja dalam bidang pendidikan, disamping itu, sumber penerimaan suatu daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Belanja Daerah merupakan kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah.

PAD adalah penerimaan yang diterima daerah dari sumber-sumber yang dimiliki daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada Provinsi atau Kabupaten/Kota.

DAU merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi di Provinsi.

DAK merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

DBH merupakan hak daerah atas pengelolaan sumber-sumber penerimaan negara yang dihasilkan dari masing-masing daerah, yang besarnya ditentukan atas daerah penghasil (by origin) yang didasarkan atas ketentuan perundangan yang berlaku.

**METODE**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk data panel dengan rentan waktu tahun 2015-2019. Data ini terdiri dari Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang diperoleh dari [www.depkeu.djpk.go.id](http://www.depkeu.djpk.go.id) . Penelitian ini menggunakan model analisis regresi data panel. Model persamaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Log-ganda. Karena model log-ganda dapat diperoleh koefisien masing-masing variabel independennya. Persamaannya dapat dituliskan sebagai berikut :

**LogBDit = β0 + β1LogPADit + β2LogDAUit + β3LogDAKit + β4LogDBHit + εt**

Keterangan :

BD = Belanja Daerah

α = Konstanta

β1,β2,β3,β4 = Koefisien regresi masing-masing variabel independen

PAD= Pendapatan Asli Daerah

DAU= Dana Alokasi Umum

DAK= Dana Alokasi Khusus

DBH= Dana Bagi Hasil

ɛt = *Error term*

i = Kabupaten/Kota

t = Waktu

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Untuk menguji hipotesis adanya pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap BD digunakan program eviews 8. Dari hasil pengolahan data yang telah dilakukan, diperoleh hasil regresi sebagai berikut :

Tabel 1 Hasil Estimasi

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variable** | **Coefficient** | **Probability** |
| CONSTANTA | 18.50099 | 0.0001 |
| LPAD | 0.120097 | 0.0453 |
| LDAU | -0.134089 | 0.0826 |
| LDAK | 0.008355 | 0.0180 |
| LDBH | 0.374346 | 0.0037 |

*Sumber : Hasil Estimasi*

1. Hasil estimasi persamaan model regresi data panel dengan metode *fixed Effects* diperoleh konstanta sebesar 18.50099, jika variabel independen PAD, DAU, DAK, dan DBH sama dengan nol, maka belanja daerah akan naik sebesar 18.50099%.

2. Hasil estimasi persamaan model regresi data panel dengan metode *fixed Effects* menghasilkan nilai koefisien regresi variabel PAD sebesar 0.120097 artinya jika PAD naik sebesar 10% dengan asumsi DAU, DAK, dan DBH tetap maka belanja daerah Provinsi Riau naik sebesar 1.20097%.

3. Hasil estimasi persamaan model regresi data panel dengan metode *fixed Effects* menghasilkan nilai koefisien regresi variable DAU sebesar - 0.134089 artinya jika DAU naik sebesar 10% dengan asumsi PAD, DAK, dan DBH tetap maka belanja daerah Provinsi Riau turun sebesar 1.34089%.

4. Hasil estimasi persamaan model regresi data panel dengan metode *Fixed Effects* menghasilkan nilai koefisien regresi variable DAK sebesar 0.008355 artinya jika DAK naik sebesar 10% dengan asumsi PAD, DAU, DBH tetap maka belanja daerah Provinsi Riau meningkat sebesar 0.08355%.

5. Hasil estimasi persamaan model regresi data panel dengan metode *Fixed Effects* menghasilkan nilai koefisien regresi variable DBH sebesar 0.374346 artinya jika DBH naik sebesar 10% dengan asumsi PAD, DAU, DAK tetap maka belanja daerah Provinsi Riau meningkat sebesar 0.374346%.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Hasil Penelitian menemukan bahwa variabel PAD, DAK, dan DBH berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, sedangkan DAU berpengaruh tidak signifikan terhadap belanja daerah di Provinsi Riau karena besarnya PAD yang didapat telah mampu mencukupi belanja daerah tanpa harus bergantung dari DAU. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan periode penelitian yang lebih panjang dengan memperoleh hasil yang lebih baik. Dan penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan variabel lain selain dari variabel yang ada dalam penelitian ini.

**UCAPAN TERIMA KASIH**

Terimakasih banyak penulis ucapkan kepada Ibu Dr Erni Febrina Harahap S.E.,M.Si selau pembimbing I dan kepada Bapak Kasman Karimi S.E.,M.Si selaku pembimbing II saya. Beliau selalu sabar membimbing saya, memberikan saran serta arahan yang sangat dibutuhkan penulis dalam penelitian ini.

**DAFTAR PUSTAKA**

Bambang Prakosa, Kesit. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Edisi Revisi. UII Press. Yogyakarta.

Ernayani, R. (2017). P*engaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus pada 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Periode 2009-2013)*. JSHP ( Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*)*, *1*(1), 43. https://doi.org/10.32487/jshp.v1i1.234

Erni Febrina Harahap, dkk. (2020) *Tinjauan Defisit Fiskal, Ekspor, Impor, dan Jumlah UMKM terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.* Jurnal Benefita 5 (2) Juli 2020 (151-161).

Fatimah, N. N., Nopiyanti, A., & Mintoyuwono, D. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah. *Equity*, *22*(2), 197. https://doi.org/10.34209/equ.v22i2.936

Joko Untung,Tri Widyastuti dan Suyanto, 2017. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus , terhadap Belanja Daerah dan Dana Bagi Hasil sebagai Pemoderasi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat priode tahun 2010­2014.* Volume 1 No 2 : Universitas Pancasila.

Kaho, Josef Riwu. 2005. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Faktor-faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan Otonomi Daerah*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.